



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Rini Sri Priyani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau,
Indonesia
E-mail: rinisripriyani@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze the financial performance of the Kuantan Singingi district government as measured using regional financial ratio analysis, namely the degree of decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional independence ratio, PAD effectiveness and efficiency ratio, effectiveness and efficiency ratio regional taxes, operating expenditure ratio, capital expenditure ratio and expenditure efficiency ratio.

Based on the results of this research, it was concluded that the regional financial performance of the regional government of Kuantan Singingi district for the three fiscal years 2020-2022 was that the regional income performance of Kuantan Singingi district, seen from income growth, generally experienced a decline in regional income performance, this was shown by a decrease in income growth each year. Judging from the growth of spending, in general there has been a decline in regional spending performance, this is shown by the decline in spending growth every year. Judging from the ratio of the degree of decentralization in general, it can be said to be not good with very low criteria. Judging from the regional financial dependency ratio, in general it is not good with high criteria. Judging from the regional independence ratio, it can generally be said to be not good with very low criteria. Judging from the ratio of effectiveness and efficiency, PAD can generally be said to be not good with the criteria being quite effective. Judging from the ratio of effectiveness and efficiency of regional taxes, in general it can be said to be not good with the criteria of being less effective. Judging from the operating expenditure ratio, in general it can be said to be not good with less harmonious criteria. Judging from the operating expenditure ratio, it can generally be said to be not good with the criteria of not being compatible. Judging from the spending efficiency ratio, it can generally be said to be not good with the criteria being quite efficient.

Keywords: *Financial Performance, Financial Ratio Analysis, Budget Realization Report.*

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Negara merupakan uang yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

merupakan amanat rakyat untuk mewujudkannya, regulasi pengelolaan keuangan Negara diperlukan sebagai pedoman yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kesesuaian pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja yang ada didalamnya. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Namun masih banyak pihak yang belum dapat memahami atau membaca laporan keuangan tersebut dengan baik. Hal ini merupakan hal yang wajar, sebab berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda atau bahkan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh sebab itu diperlukan analisis laporan keuangan dengan banyak metode-metode dan salah satunya yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Didalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan perusahaan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena didalam instansi pemerintahan tidak berorientasi pada laba seperti tujuan perusahaan pada umumnya. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Tabel 1.1
Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022

Struktur APBD	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	1.449.814.113.991	1.347.161.271.589	1.313.503.378.951
Pendapatan Asli Daerah	73.950.440.456	95.230.632.831	87.909.018.160
Pendapatan Transfer	1.329.586.583.534	1.207.522.128.758	1.225.481.414.608
Belanja Daerah	1.144.764.794.635	1.029.986.132.737	1.004.264.839.539
Belanja Operasi	953.105.707.346	906.599.182.521	899.783.751.493
Belanja Modal	161.270.005.084	118.985.719.427	104.750.740.286
Surplus/(Defisit)	35.960.818.822	63.303.289.270	55.564.364.933

Sumber : BPKAD Data Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa pendapatan daerah pemerintah kabupaten Kuantan Singingi lebih besar diperoleh dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan transfer sebesar 1.329.586.583.534 ditahun 2020, dan mengalami penurunan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ditahun 2021 yaitu sebesar 1.207.522.128.758, dan mengalami kenaikan ditahun 2022 sebesar 1.225.481.414.608. Dan Pendapatan Asli Daerah 73.950.440.456 ditahun 2020, dan meningkat ditahun 2021 sebesar 95.230.632.831 dan mengalami penurunan sebesar 87.909.018.160 ditahun 2022. Ini menunjukkan bahwa kabupaten Kuantan Singingi masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan menggali sumber daya asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunannya.

Dan belanja daerah kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa belanja rutin (operasi) 953.105.707.346 ditahun 2020, 906.599.182.521 ditahun 2021, dan 899.783.751.493 ditahun 2022, meskipun dalam tiga tahun terakhir sudah mengalami penurunan hal ini masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (pembangunan) yaitu sebesar 161.270.005.084 ditahun 2020, 118.985.719.427 ditahun 2021, dan 104.750.740.286 ditahun 2022. Sama halnya belanja operasi tiap tahun menurun maka belanja modal pun menurun. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Kuantan Singingi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk memenuhi atau pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum dapat memperhatikan pembangunan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis pendapatan selama periode tahun 2020-2022?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis belanja selama periode tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis pendapatan selama periode tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis belanja selama periode tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian **Manfaat Teoritis**



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dalam berfikir, dan memperluas pengetahuan baik dalam teori maupun praktek . dan tentunya mampu untuk mengembangkan akuntansi sektor publik terkhusus dalam menilai kinerja keuangan pada pemerintahan daerah.

Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan berfikir, memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek untuk mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Bagi Universitas Islam Kuantan Singingi, sebagai informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan memperdalam mengenai masalah penelitian ini dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya masalah tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan daerah.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama diajukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Dan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004, modul pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan menyatakan bahwa jenis-jenis laporan keuangan adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- a. Pendapatan
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
2. Neraca (*balance sheet*)
 - a. Aset (*asset*)
 - b. Kewajiban (*liabilities*)
 - c. Ekuitas dana (*equity*)
 3. Laporan arus kas (*statement of cash flow*)
 4. Catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statements*)

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang didalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang. Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan atau implementasi, dan
3. Tahap pelaporan dan evaluasi kinerja

2.4 Analisis Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan banyak digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap masalah-masalah keuangan pemerintah. Dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi laporan yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang dialaminya. Kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan ini diperlukan mengingat setiap entitas pelaporan menggunakan sumber dana/anggaran yang berasal dari rakyat dan perlu dipertanggungjawabkan capaian kegiatannya.

2.5 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil yang telah dicapai dari penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah atas pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dengan menilai efisiensi.



3 METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan November 2023 sampai dengan Mei 2024.

Jadwal Penellitian										
Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan									
	2023						2024			
	Bulan	Mei	Jun	Jul	Ags	Nov	Des	Jan	Feb	Mei
Pencarian data awal	■									
Penyusunan Proposal										
Pengajuan Proposal	■									
Judul diterima		■								
Penyerahan Proposal Kepada Pembimbing		■	■							
Bimbingan		■	■	■						
Seminar Proposal					■					
Revisi Proposal						■	■			
Penelitian dan bimbingan							■	■	■	
Ujian Komperensif										■

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer menurut Sunyoto (2013;21) adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data ini seperti wawancara langsung dan observasi kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data sekunder



Data sekunder menurut Sugiyono (2015;137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2022.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi

Dilakukan dengan mengadakan pengumpulan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi berupa laporan realisasi anggaran (LRA).

2. Metode Observasi

Metode observasi menurut Sunyoto (2013;22) adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka merupakan sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi kajian pustaka didalam suatu penelitian. Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori-teori terkait kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

a. Analisis Pertumbuhan

1. Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

2. Pertumbuhan belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Th t} - \text{Realisasi Belanja Th t-1}}{\text{Realisasi Belanja Th t-1}} \times 100\%$$

b. Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

6. Analisis Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

7. Analisis Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

8. Analisis Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4 HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Pertumbuhan

a. Pertumbuhan Pendapatan

Laju analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk dapat mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode pelaporan, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

Tahun	Keterangan			
	Realisasi Pendapatan Tahun	Naik/turun	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Kriteria Kemampuan
2019	1.521.239.948.407	-	-	-
2020	1.449.814.113.991	(71.425.834.416)	-5%	Negatif
2021	1.347.161.271.589	(102.625.842.402)	-7%	Negatif
2022	1.313.503.378.951	(33.657.892.638)	-2%	Negatif

Rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar -5% dengan total defisit yaitu Rp -71.425.834.416. dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp102.635.842.402. pada tahun 2022 pertumbuhan pendapatan kembali mengalami penurunan sebesar -2% dengan selisih total pendapatan dengan tahun lalu sebesar -



33.657.892.638. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan bernilai negatif Karena setiap tahunnya mengalami penurunan.

b. Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun.

Tahun	Keterangan			
	Realisasi Belanja Tahun	Naik/turun	Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah	Kriteria Kemampuan
2019	1.285.877.353.956	-	-	-
2020	1.144.764.794.635	(141.112.559.321)	-11	Negatif
2021	1.029.986.132.737	(114.778.661.898)	-10	Negatif
2022	1.004.264.839.539	(25.721.293.198)	-2	Negatif

Rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2020 yaitu sebesar -11% dengan total defisit yaitu Rp -141.112.559.321. dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp -114.778.661.898. pada tahun 2022 pertumbuhan belanja kembali mengalami penurunan sebesar -2% dengan selisih total pendapatan dengan tahun lalu sebesar -25.721.293.198. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja bernilai negatif Karena setiap tahunnya mengalami penurunan.

4.2 Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasinya.

Tahun	Keterangan			
	Realisasi PAD	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4=2:3	5
2020	73.950.440.456	1.449.814.113.991	5%	Tidak baik
2021	95.230.632.831	1.347.161.271.589	7%	Tidak baik
2022	87.909.018.160	1.313.503.378.951	7%	Tidak baik

Rasio derajat desentralisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 5%, tahun 2021 sebesar 7% , dan tahun 2022 sbesar 7%. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan rendah sekali. Dari tahun 2020 sampai 2022 yang paling tinggi yaitu terdapat pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 7% dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 5%.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Tahun	Keterangan			
	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4=2:3	5
2020	1.329.586.583.534	1.449.814.113.991	92%	Tinggi
2021	1.207.522.128.758	1.347.161.271.589	90%	Tinggi
2022	1.225.481.414.608	1.313.503.378.951	93%	Tinggi

Rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 92%, pada tahun 2021 sebesar 90% dan pada tahun 2021 sebesar 93%. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan tinggi. Rasio ketergantungan keuangan daerah yang paling tinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 93% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 90%.

3. Rasio Kemandirian Daerah

Semakin tinggi angka rasio ini maka menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian daerahnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menggunakan PAD sebagai sumber pendapatan.

Tahun	Keterangan			
	Realisasi PAD	Realisasi Pemerintahan Pusat, Propinsi & Pinjaman	Rasio Kemandirian Daerah	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4=2:3	5
2020	73.950.440.456	1.329.586.583.534	6%	Rendah sekali
2021	95.230.632.831	1.207.522.128.758	8%	Rendah sekali
2022	87.909.018.160	1.225.481.414.608	7%	Rendah sekali

Rasio kemandirian daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 6%, pada tahun 2021 sebesar 8% dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya PAD yang dapat digali oleh pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana dari pemerintah



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

pusat dan kewenangan untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikelola oleh pemerintahan pusat.

4. Rasio Efektivitas PAD

Pendapatan Asli Daerah rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD dianggarkan. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam melakukan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tahun	Keterangan			
	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4=2:3	5
2020	73.950.440.456	91.346.460.668	81%	Kurang efektif
2021	95.230.632.831	125.168.152.334	76%	Kurang efektif
2022	87.909.018.160	121.046.062.547	73%	Tidak efektif

Rasio efektivitas PAD pada tahun 2020 yaitu sebesar 81%, pada tahun 2021 sebesar 76%, dan pada tahun 2022 sebesar 73%. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dikatakan kurang efektif karena pencapaian persentasenya dibawah diantara 75-89%. Dan tahun 2022 dikatakan tidak efektif karena pencapaian persentasenya dibawah 75%.

5. Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah

Rasio efektivitas pendapatan pajak daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah dianggarkan. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam melakukan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Tahun	Keterangan			
	Realisasi pajak daerah	Target pajak daerah	Rasio Efektivitas	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4=2:3	5
2020	27.704.671.966	29.703.225.871	93%	Efektif
2021	30.146.425.861	54.676.906.966	55%	Kurang efektif
2022	33.535.023.432	52.094.077.168	64%	Kurang efektif

Rasio efektivitas pajak daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 93% , pada tahun 2021 sebesar 55%, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 64%. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang menunjukkan tidak efektif dikarenakan pencapaian persentasenya dibawah antara 60-80%. Pada tahun 2021 menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu efektif Karena pencapaian persentasenya diantara 90-100% yaitu sebesar 93%.

6. Rasio Belanja Operasi



Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah, untuk mengukur seberapa besar porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi, yang mencakup pengeluaran rutin untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tahun	Keterangan			
	Realisasi belanja operasi	Realisasi belanja daerah	Rasio belanja operasi	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4=2:3	5
2020	953.105.707.346	1.144.764.794.635	83%	Kurang serasi
2021	906.599.182.521	1.029.986.132.737	88%	Kurang serasi
2022	899.783.751.493	1.004.264.839.539	90%	Kurang serasi

Rasio belanja operasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 83%, pada tahun 2021 sebesar 88%, dan pada tahun 2022 sebesar 90%. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 rasio belanja operasi pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dikatakan kurang serasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kurangnya serasian dalam pengeluaran yang disesuaikan dengan porsinya masing-masing.

7. Rasio belanja modal

Rasio belanja modal adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah, yang mencakup pengeluaran yang dialokasikan untuk investasi dengan belanja operasi yang merupakan pengeluaran yang berulang dan dapat diperhitungkan sebagai persentase dari total belanja daerah.

Tahun	Keterangan			
	Realisasi belanja modal	Realisasi belanja daerah	Rasio belanja modal	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4=2:3	5
2020	161.270.005.084	1.144.764.794.635	14%	Tidak serasi
2021	118.985.719.427	1.029.986.132.737	12%	Tidak serasi
2022	104.081.538.901	1.004.264.839.539	10%	Tidak serasi

Rasio belanja modal pada tahun 2020 yaitu sebesar 14%, pada tahun 2021 sebesar 12%, dan pada tahun 2022 sebesar 10%. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 rasio belanja modal pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dikatakan tidak serasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak serasian dalam pengeluaran yang disesuaikan dengan porsinya masing-masing.

8. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. rasio efisiensi belanja membantu dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dapat menunjukkan seberapa



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

besar porsi belanja yang di alokasikan untuk investasi dan sebarap besar belanja yang berhasil diambil.

Tahun	Keterangan			
	Realisasi belanja daerah	Target belanja daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria Kemampuan
1	2	3	4=2:3	5
2020	1.144.764.794.635	1.275.056.781.241	90%	Cukup efisien
2021	1.029.986.132.737	1.194.401.198.725	86%	Cukup efisien
2022	1.004.264.839.539	1.179.933.747.291	85%	Cukup efisien

Rasio efisiensi belanja daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 90%, pada tahun 2021 sebesar 86%, dan pada tahun 2022 sebesar 85%. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 rasio efisiensi belanja pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dikatakan cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi cukup baik dalam penghematan belanja.

5 KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari analisis pendapatan didapatkan hasil kesimpulan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 dilihat dari pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan, berdasarkan rasio derajat desentralisasi kriteria rendah sekali, dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah kriteria tinggi sekali, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah kriteria rendah sekali, dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD kriteria cukup efektif, dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah kriteria kurang efektif.
2. Berdasarkan dari analisis belanja didapatkan hasil kesimpulan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 dilihat dari pertumbuhan belanja mengalami penurunan, berdasarkan rasio belanja operasi kriteria kurang serasi, dilihat dari rasio belanja modal kriteria tidak serasi, dilihat dari rasio efisiensi belanja kriteria cukup efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedepannya, antara lain:

1. Sebaiknya Pemerintah kabupaten kuantan singingi lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah.
3. Sebaiknya Pemerintah kabupaten kuantan singingi lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
4. Disarankan untuk peneliti selanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti yang menyarankan agar peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit STIM YPKN.
- Mardiasmo. 2013. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Prasetya, E, G. 2021. *Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. ANDI : Yogyakarta.
- Subramanyam, K, R. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V, Wiratna. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika.
- Supardan, Herry. 2020. *Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah*. MNC: Malang.

Jurnal/Skripsi :

- Abdul, Wachid. 2013. Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 747-752.
- Ardila, I. dan A.A. Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15(1): 79.
- Dewi, E. P. 2018. Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2).
- Dewi, M. S., N. A. S. Dharmawan, Dan D. N. S. Werastuti. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). *Jurnal Akuntansi*. 3 (1).



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- Fathah, R. N. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Lubis, Putri Kemala Dewi, Dan Nurlia Hafni. 2017. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013.” *Kitabah 1 No 1(2017)*: 20–45.
- Mahbur,P,S. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Soppeng).*Jurnal Riset Edisi III 004*.
- Mentari Yosephen Sijabat, C. S. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 2(2), 236–242.
- Pilat , Morasa. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015. Vol 6 No 1 (2017).
- Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(13).
- Ridwan,musi'd. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.12 No.2, 2019 Hal. 222-241*.
- Sari, Saragih, Lenny Menara, Indonesia. 2018. *Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 3 No. 2 Tahun 2018*.
- Siregar,Azila,I. 2020. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Peraturan Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah. 2007. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 32 Tentang Pemerintah Daerah.

Website :

<https://kuansing.go.id/id/blog/kabupaten-kuansing-kembali-raih-wtp-yang-ke-12-dari-bpk-ri-provinsi-riau.html>